

**SKRIPSI**  
**UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI**  
**TERHADAP PUTUSAN BEBAS**



**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-Syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhamamdiyah Surakarta**

**Oleh :**  
**Pramudya Andre Wijananda**  
**NIM : C 100080075**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**2013**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhamamdiyah Surakarta

Pembimbing I

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Iksan', written over a horizontal line.

(Muhammad Iksan, S.H., M.H.)

Pembimbing II

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Hartanto', written over a horizontal line.

(Hartanto, S.H.M.Hum)

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Selasa



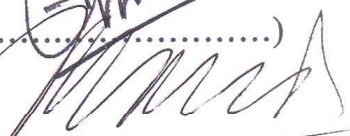
Tanggal : 16 Juli 2013

Dewan Penguji :

Ketua : Muchammad Iksan, S.H., M.H


Sekretaris : Hartanto, S. H., M.Hum

Anggota : Sudaryono, S.H., M.Hum

(.....)   
(.....)   
(.....) 



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

  
(Muchamad Iksan, SH.MH)

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

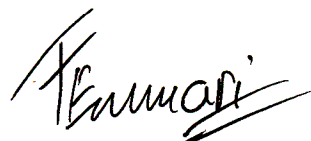
Nama : Pramudya Andre Wijananda  
N I M : C. 100080075  
Alamat : Anggorosari RT 02 RW I Pulisen Boyolali

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 03 Juli 2013

Yang Membuat Pernyataan,



Pramudya Andre Wijananda  
NIM : C 100080075

## **MOTTO**

*"Bukan tentang tugas selesai atau tidak, tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari tugas yang kita selesaikan  
(Penulis)"*

Rahasia terbesar mendapatkan apa yang anda inginkan dalam kehidupan adalah mengetahui apa yang anda inginkan dan percaya anda bisa mendapatkannya.  
Lakukan sesuatu untuk orang lain, kemudian mintalah pada Tuhan untuk membantu Anda mendapatkannya.  
(Penulis)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Bapak Ibu yang tercinta atas doanya dan penantiannya.
2. Saudara-saudaraku tersayang yang telah memberikan doa dan dorongan semangatnya
3. Sahabat-sahabat ku
4. Almamaterku

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah* puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, keagungan dan kebesaran-Nya. Shalawat serta salam bagi sang teladan Nabi Muhammad SAW. Atas rahmat dan pertolongan-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) dengan judul : “UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN BEBAS”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) dan sepanjang hidup penulis, penulis tak lepas dari bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dari banyak pihak. Oleh karena itu, perkenanlah penulis menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Bambang setiaji selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Surakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menyusun penulisan hukum ini
2. Bapak Muchamad Iksan,S.H,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhamamdiyah Surakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menyusun penulisan hukum ini
3. Bapak Muchamad Iksan,S.H,M.H. dan Hartanto, S.H.M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum yang telah memberikan bimbingan, masukan dan motivasi kepada penulis dalam menyusun penulisan hukum ini
4. Bapak Kelik Wardiono, S.H., selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasihat dan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
5. Segenap dosen dan karyawan FH UMS yang telah membantu dan membekali ilmu pada penulis, semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan penulis

6. Sahabat-sahabatku seperjuangan seluruh mahasiswa FH UMS Angkatan 2008 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu
7. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penyusunan skripsi ini

Semoga Alloh SWT membalas segala amal kebaikan semuanya, dan penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya.

Surakarta, Juli 2013

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
 BAB I. PENDAHULUAN .....	 1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	6
C. Perumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Kerangka Berfikir .....	8
G. Metode Penelitian .....	10
H. Sistematika Penelitian .....	13
 BAB II. LANDASAN TEORI .....	 15
A. Tinjauan Umum Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	 15

B. Upaya Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .....	18
1. Upaya Hukum Biasa ( <i>Gewone Rechtsmiddelen</i> ) .....	18
2. Upaya Hukum Luar Biasa .....	24
C. Jenis-Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana .....	27
1. Putusan Bebas ( <i>Vrijspraak/Acquittal</i> ) .....	28
2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum ( <i>Ontslag van Alle Rechtsvervolging</i> ) .....	32
3. Putusan Pemidanaan ( <i>Veroordeling</i> ).....	33
D. Putusan Bebas Murni ( <i>Zuivere Vrijspraak</i> ) dan Putusan Bebas Tidak Murni ( <i>Onzuivere Vrijspraak</i> ,) .....	34
1. Putusan Bebas Murni ( <i>Zuivere Vrijspraak</i> ).....	34
2. Putusan Bebas Tidak Murni ( <i>Onzuivere Vrijspraak</i> )....	35
E. Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas ( <i>Vrijspraak</i> ).....	37
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	42
A. Pihak-Pihak Yang Berhak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas .....	42
B. Pandangan Pakar Hukum Tentang Praktek Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas .....	42
C. Analisa Kasus .....	61
	73

BAB IV. PENUTUP .....	80
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran-Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## ABSTRAK

Pramudya Andre Wijananda. Nim: C100080075. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Peninjauan kembali yaitu kapasitasnya sebagai penuntut umum yang mewakili negara dan kepentingan umum dalam proses penyelesaian perkara pidana. Peninjauan kembali ini bukan karena kepentingan pribadi jaksa penuntut umum atau lembaga Kejaksaan tetapi untuk kepentingan umum/negara. Dan putusan bebas bisa juga didasarkan atas penilaian, bahwa kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim jadi sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.

Dalam hal ini penulis meneliti mengenai upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan bebas.

Penulis berpendapat bahwa Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*incraht*) sehingga tidak dapat lagi disalurkan melalui upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi. JPU secara formal tidak boleh mengajukan Peninjauan Kembali, dengan alasan KUHAP sudah memberikan aturan yang jelas mengenai prosedural acara pengajuan permohonan PK beserta limitasi-limitasinya. Para penegak hukum semestinya mengacu pada aturan formal tersebut. Apabila memang dirasa perlu terobosan hukum mengenai perlunya formulasi Peninjauan Kembali yang memang boleh diajukan oleh JPU. Maka diperlukan aturan yang khusus, lebih rinci, dan mengandung unsure keadilan serta kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

H.L.A. Hart, terdapat pembedaan dua sistem hukum, yaitu apa yang disebut sebagai aturan primer (*primary rules*) dan aturan sekunder (*secondary rules*). Aturan primer (*primery rules*) lebih menekankan kepada kewajiban manusia untuk bertindak atau tidak bertindak. Oleh karena itu dengan adanya Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum menyebabkan rancunya tata aturan hukum yang ada. Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis setuju adanya teori hukum positivisme yaitu memandang bahwa suatu produk hukum dibatasi oleh aturan-aturan yang mengikat sebagai pedoman. Untuk itu keputusan-keputusan hukum yang akan dihasilkan oleh pihak manapun tidak dengan mudah berubah-ubah, tidak bertentangan satu dengan lainnya, mudah dimengerti dan tidak membingungkan serta memiliki nilai kepastian.

Kata Kunci: Upaya Hukum, Peninjauan Kembali, Putusan Bebas